ARSITEKTUR TRADISIONAL BUGIS MAKASSAR
(Survei pada Atap Bangunan Kantor di Kota Makassar)

Rahmansah
Jurusan Pendidikan Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Negeri Makassar
Bakhrani Rauf
Jurusan Pendidikan Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Negeri Makassar

ABSTRACT

Traditional architecture builds upon rules adopted traditions of local communities. Traditional architecture is also a formation of cultural elements that grow and develop along with the growth of a tribe that serve as an identity of the tribe. Traditional architecture should be preserved in order to maintain their extinction. The purpose of this study was to determine changes in the traditional architecture of Bugis Makassar on the roof of an office building in the city of Makassar. Samples were selected intentionally, namely the office of Governor of South Sulawesi, South Sulawesi Provincial Parliament offices, office Makassar City Council, and the Office of PT. PELNI Branch Makassar. Data obtained through field observations, interviews with planning consultants, building users, and tracking documents. The analysis used is descriptive analysis. The results showed that the traditional architecture of Bugis Makassar amended on the roof of the building, namely: a) The shape of the roof, b) color of the roof, c) arrangement timpalaja / sambulayang, and d) the height / slope of the roof.

Keywords: *Makassar Bugis traditional architecture, roof, change*

PENDAHULUAN

Arsitektur sebagai salah satu bagian dari karya budaya, sarat dengan makna kehidupan, merupakan apresiasi terhadap lingkungan alam sekitar, hingga ekspresi perwujudan seni estetika jiwa manusia. Arsitektur tradisional dibangun berdasarkan kaidah-kaidah tradisi yang dianut masyarakat setempat. Arsitektur tradisional juga merupakan suatu bentukan dari unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan suatu suku bangsa sehingga dijadikan sebagai suatu identitas suku bangsa tersebut. Arsitektur tradisional adalah suatu bangunan yang bentuk, ragam hias dan cara pelaksanaannya diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Arsitektur tradisional adalah cermin tata nilai dan budaya yang ditradisikan oleh masyarakatnya (Budihardjo, 1997).

Arsitektur tradisional adalah kebudayaan fisik yang dalam konteks tradisional merupakan bentuk ungkapan yang berkaitan erat dengan kepribadian masyarakatnya. Ungkapan fisik sangat dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural dan lingkungan dimana ia tumbuh dan berkembang, sehingga perbedaan latar sosio-kultural dan lingkungan mempengaruhi ungkapan dalam

arsitekturalnya. Kebijakan pemerintah terkait pelestarian budaya antara lain: 1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992, bahwa kewajiban Pemerintah Pusat dengan seluruh jajarannya dan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan segenap warganya mengembangkan kebudayaan dalam arti yang luas, sehingga kehidupan budaya warga bersangkutan dapat mengalami kemajuan. 2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982, bahwa kewajiban Pemerintah Daerah bersangkutan maupun Pemerintah Pusat untuk memperhatikan berbagai fenomena budaya yang antara lain terungkap pada karya arsitektur peninggalan masa lalu yang lengkap dengan nilai-nilai yang melekat padanya, untuk kemudian menciptakan peraturan yang khusus mengatur lingkungan hayati, spasial dan sosial yang berkaitan dengan kekhasan daerahnya.

Kota Makassar sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pusat pelayanan regional, berkembang diiringi dengan pembangunan berbagai fasilitas termasuk fasilitas perkantoran untuk menunjang fungsinya. Sebagian bangunan perkantoran di Kota Makassar menjadikan arsitektur tradisional lokal sebagai inspirasi di dalam perencanaan dan perancangan. Penerapannya dapat dilihat melalui elemen *(tangible)* khususnya pada atap bangunan.

Arsitektur sebagai salah satu aspek kebudayaan adalah merupakan perwujudan nilai-nilai yang dianut dan dipelihara untuk diwariskan kegenerasi berikutnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Yudono (2008) bahwa: "semakin cepat dilakukan kajian untuk menggali kearifan arsitektur tradisional lokal semakin baik, sebelum para sesepuh bijak cerdik cendekia bidang budaya, sosiologi dan arsitektur tradisional terlanjur berpulang sehingga kita dapat merajut kembali *local wisdom architecture tacit knowledge,* yang sangat kita perlukan termasuk oleh generasi penerus". Selanjutnya Anwar (2005) berpendapat bahwa kurangnya pemahaman makna dan nilai tentang arsitektur Bugis Makassar, sehingga dikhawatirkan akan sirna dan pupus terakibat kehilangan jati dirinya. Arsitektur sebagai salah satu aspek kebudayaan adalah merupakan perwujudan nilai-nilai yang dianut dan dipelihara untuk diwariskan kegenerasi berikutnya. Bahwa penutur asli *(Panrita Bola/Balla)* kurang mampu menyampaikan secara sistematis dan juga sudah mulai uzur dan pupus; yang apabila tidak diregenerasikan maka sudah dapat dipastikan akan kehilangan identitas arsitektur. Dilain pihak, lebarnya kesenjangan pemahaman dan persepsi tentang arsitektur bagi para pelaku pambangunan.

Menurut Saliya (2003), mengatakan bahwa arsitektur tradisional pada dasarnya tidak mengenal ukuran yang formal seperti meter atau feet. Ukuran yang digunakan adalah selalu bersifat kongkrit yakni merujuk pada ukuran atau besaran benda, misalnya: ukuran bagian tubuh manusia, seperti depa, hasta, tinggi pundak, rentang-rentang tegak dan lebar langkah. Besaran-besaran ini selalu dikaitkan dengan nilai-nilai kosmologis yang memandang segala sesuatu dalam kaitan dengan posisi terhadap alam semesta atau jagad raya yang merupakan bagian dari proses penciptaan alam raya. Hal tersebut sejalan dengan Ronald (2005) bahwa satuan ukuran yang digunakan untuk menentukan besaran panjang atau jarak, digunakan bagian tubuh mulai dari ibu jari, telapak tangan, telapak kaki dan panjang lengan atau yang lebih dikenal dengan ukuran antropometrik.

Arsitektur tradisional sebagai salah satu bentuk warisan budaya merupakan pengendapan fenomena dari waktu ke waktu yang berlangsung secara runtut

evolusioner dengan situasi budaya yang penuh konflik perubahan atau perkembangan. Tuntutan akan makna dan identitas dari arsitektur semakin meningkat. Kekerdilan penalaran kognitif dan kemiskinan penghayatan afektif atas nafas dan jiwa yang melembari arsitektur tradisional selama ini telah mengakibatkan munculnya bangunan-bangunan yang berbedak tradisional, komponen fisik dan wajah visualnya dipakai, tetapi falsafah nilai, sistem perlambang dan pemaknaan sosial ditiadakan (Budihardjo, 1989).

Mardanas (1985) dahulu kala suku Bugis Makassar menganut kepercayaan attau riolong yang mengajarkan pandangan kosmologis, bahwa alam raya (makro kosmos) bersusun tiga tingkat, yaitu: botting langi' (dunia atas), ale kawa (dunia tengah) dan uri liyu (dunia bawah). Pusat ketiga bagian alam raya ialah botting langi, tempat bersemayamnya dewata Seuwae. Pandangan kosmologis tentang makro kosmos diwujudkan pada rumah tinggalnya yang dianggap sebagai mikro kosmos. Oleh karena itu, rumahnya terdiri atas tiga bagian yaitu: rakkeang (para-para/loteng), ale bola (badan rumah) dan awa bola (kolong rumah). Ketiga bagian itu terpusat pada posi bola yaitu bagian yang dianggap suci.

Tato (2008) mangatakan bahwa konsep arsitektur tradisional Bugis Makassar memandang kosmos terbagi atas tiga bagian, sehingga secara struktural rumah tradisional Bugis Makassar terdiri dari: a) struktur bagian bawah, b) struktur badan rumah, dan c) struktur bagian atas.

Ketiga bagian-bagian struktur di atas memperlihatkan adanya keserasian antara struktur bagian bawah, struktur tengah dan struktur atas. Hal ini disebabkan karena ukuran yang mereka gunakan didasarkan pada ukuran perbandingan dari anggota badannya sendiri. Dasar ukuran itu adalah : tinggi badan, panjang depa, panjang langkah, panjang hasta, panjang jengkal dan panjang atau lebar jari.

Masalah penelitian ini adalah bagaimana perubahan arsitektur tradisional Bugis Makassar pada bagian atap bangunan kantor di Kota Makassar yang terdiri atas: a) bentuk atap, b) warna atap, c) susunan *timpalaja,* dan c) ketinggian/kemiringan atap. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan arsitektur tradisional Bugis Makassar pada atap bangunan kantor di Kota Makassar yang terdiri atas: a) bentuk atap, b) warna atap, c) susunan *timpalaja,* dan c) ketinggian/kemiringan atap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi di dalam penelitian ini adalah bangunan kantor yang menerapkan arsitektur tradisional Bugis Makassar pada atap bangunan di Kota Makassar. Sampel diambil secara sengaja *(purpossive sampling)* yaitu kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kantor DPRD Kota Makassar, dan kantor PT. PELNI Cabang Makassar.

Variabel yang diteliti adalah perubahan atap yaitu a) perubahan bentuk atap, b) perubahan warna atap, c) perubahan susunan timpalaja, dan d) perubahan ketinggian atap. Pengumpulan data dilakukan dengan a) observasi, b) wawancara, dan c) kajian pustaka.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu mendiskripsikan secara mendalam perubahan a) bentuk atap, b) warna atap, c) susunan *timpalaja//sambulayang,* dan d) ketinggian/kemiringan atap.

1. Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan	2. Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kantor DPRD Kota Makassar	4. Kantor PT. PELNI Cabang Makassar

Gambar 1. Tinjauan Atap dari Sisi Perubahan Bentuk

1. Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan	2. Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kantor DPRD Kota Makassar	4. Kantor PT. PELNI Cabang Makassar

Gambar 2. Tinjauan Atap dari Sisi Perubahan Warna

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Atap dari Perubahan Bentuk

Atap pada arsitektur tradisional Bugis Makassar berbentuk prisma segi tiga memanjang ke belakang. Untuk melihat perubahan bentuk atap dapat dilihat pada Gambar 1, yaitu perbandingan antara kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kantor DPRD Kota Makassar, dan kantor PT. PELNI Cabang Makassar.

Bentuk atap pada kantor Gubernur Provinsi Sulawasi Selatan dan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara utuh menerapkan bentuk atap prisma segi tiga pada masing-masing atap bangunan

tersebut. Namun pada kantor DPRD Kota Makassar dan kantor PT. PELNI Cabang Makassar tidak menerapkan secara utuh bentuk atap prisma segi tiga pada masing-masing atap bangunan tersebut. Atap pada kantor Gubernur Provinsi Sulawasi Selatan dan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki atap berbentuk prisma segi tiga. Sedangkan kantor DPRD Kota Makassar memiliki bentuk gabungan atap prisma segi tiga dan bentuk atap perisai, dan kantor PT. PELNI Cabang Makassar memiliki bentuk atap prisma segi tiga yang ditumpuk bersusun dua.

Bentuk atap kantor DPRD Kota Makassar menggabungkan bentuk atap prisma dan perisai. Atap pada bagian atas secara utuh menerapkan bentuk atap prisma segi tiga dan atap pada bagian bawah berbentuk perisai. Atap bagian atas dan bagian bawah memiliki jarak yang juga berfungsi sebagai ventilasi. Hal ini memberikan kesan bahwa atap selain berbentuk perisai juga berbentuk prisma segi tiga sebagai mana pada bentuk atap arsitektur tradisional Bugis Makassar.

Perubahan bentuk atap tersebut didasari oleh budaya dan tradisi yang melekat pada masyarakat Bugis Makassar. Selain itu juga diwarnai dengan kemampuan perencana, pelaksana, dan keinginan pengguna bangunan.

Tinjauan Atap dari Perubahan Warna

Warna atap arsitektur tradisional Bugis Makassar berasal dari warna dasar material atap yang diperoleh dari alam seperti atap daun nipa, alang-alang dan daun rumbia berwarna cokelat, atap daun lontar berwarna kuning muda tanpa menggunakan pewarna buatan atau cat. Untuk melihat perubahan warna atap dapat dilihat pada Gambar 2, yaitu perbandingan antara kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kantor DPRD Kota Makassar, dan kantor PT. PELNI Cabang Makassar.

Perubahan warna atap pada gambar tersebut adalah atap kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan kantor DPRD Kota Makassar menerapkan warna atap sesuai dengan warna atap arsitektur tradisional Bugis Makassar. Atap kantor DPRD Kota Makassar berwarna cokelat. Atap Kantor DPRD Kota Makassar berwarna jingga dan berwarna cokelat, dan atap kantor PT. PELNI Cabang Makassar berwarna jingga.

Semua warna atap merupakan warna buatan hasil olahan industri dan bukan merupakan warna alami material. Perubahan warna atap dipengaruhi oleh pemakaian jenis material atap olahan industri seperti atap kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, atap kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, atap kantor DPRD Kota Makassar dan atap Kantor PT. PELNI Cabang Makassar yang memakai atap genteng. Pemakaian jenis material industri didasarkan pada pertimbangan ketahanan, kemudahan dalam pemeliharaan, kemudahan dalam pemasangan, pertimbangan konsultan perencana dan pemilik bangunan.

Pemakaian material atap alami tidak dapt digunakan lagi. Hal itu disebabkan oleh perkembangan teknologi. Pemakaian atap dan pemakaian warna yang mengikuti perkembangan teknologi ini masih tetap terterima oleh budaya yang dianut oleh masyarakat Bugis Makassar. Perubahan warna atap tersebut didasari oleh budaya dan tradisi yang melekat pada masyarakat Bugis Makassar. Selain itu juga diwarnai dengan kemampuan perencana, pelaksana, dan keinginan pengguna bangunan.

1. Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan	2. Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kantor DPRD Kota Makassar	4. Kantor PT. PELNI Cabang Makassar

Gambar 3. Tinjauan Atap dari Sisi Perubahan Susunan

Tinjauan Atap dari Perubahan Susunan

Susunan *timpalaja/ sambulayang* penutup atap bagian depan dan belakang pada arsitektur tradisional Bugis Makassar merupakan simbol stratifikasi sosial masyarakat Bugis Makassar, sehingga dengan melihat susunan *timpalaja/ sambulayang* atap rumahnya dapat diketahui strata sosial penghuninya. Masyarakat Bugis Makassar secara garis besarnya terdiri dari tiga pelapisan yaitu: *wija arung* (bangsawan), *to sama/to maradeka* (rakyat), *wija ata* (hamba sahaya). Seorang yang berstatus bangsawan boleh saja tinggal di *saoraja* atau boleh membangun rumah yang besarnya sama dengan *saoraja*. Penutup bubungan *(timpalaja)* bertingkat sampai lima. *Bola* (rumah rakyat dan hamba sahaya), Penutup bubungan *timpalaja* atap rumahnya tidak bertingkat. Untuk melihat perubahan susunan *timpalaja* dapat dilihat pada Gambar 3, yaitu perbandingan antara kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kantor DPRD Kota Makassar, dan kantor PT. PELNI Cabang Makassar.

Perubahan susunan *timpalaja/ sambulayang* penutup atap bagian depan dan belakang pada gambar tersebut adalah atap kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersusun empat, atap kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersusun lima, atap kantor DPRD Kota Makassar bersusun lima, atap kantor Bank BTN Cabang Makassar tidak bersusun dan atap Kantor PT. PELNI Cabang Makassar bersusun empat.

Perubahan susunan *timpalaja/sambulayang* atap kantor tidak dipengaruhi oleh adanya strata sosial melainkan hanya dipandang dari sisi estetika dan kemampuan perencana mengombinasikan struktur *timpalaja /sambulayang* tersebut. Atap bangunan kantor pemerintah, jumlah susun *timpalaja/sambulayang* semata-mata dipikirkan hanya unsur estetika dan sirkulasi udara pada bagian atap bangunan.

Tinjauan Atap dari Perubahan Kemiringan

Ketinggian atap arsitektur tradisional Bugis Makassar ditentukan berdasarkan ketinggian atap dan tidak

berdasarkan sudut kemiringan. Ketinggian atap disesuaikan dengan status penghuninya. Golongan *Arung* = ½ lebar rumah + 1 siku + 1 jengkal telunjuk + 3 jari pemilik, golongan *Tosama* = ½ lebar rumah + 1 telapak tangan, golongan *Ata* = ½ lebar rumah + 1 siku + tinggi kepala + kepalan tangan pemilik. Untuk melihat perubahan sudut ketinggian atap dapat dilihat pada Gambar 4, yaitu perbandingan antara kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kantor DPRD Kota Makassar, dan kantor PT. PELNI Cabang Makassar.

Perubahan ketinggian atap pada gambar tersebut adalah ketinggian atap pada semua sampel yang diteliti ditentukan berdasarkan sudut kemiringan dan tidak berdasarkan ketinggian atap dengan antropometrik sebagaimana pada atap arsitektur tradisional Bugis Makassar. Atap kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sudut kemiringan 45^0. Atap kantor DPRD Kota Makassar memiliki sudut kemiringan 30^0 pada atap bagian bawah dan sudut kemiringan 60^0 pada atap bagian atas. Atap kantor PT. PELNI Cabang Makassar memiliki sudut kemiringan 60^0. kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sudut kemiringan 45^0.

Ketinggian atap arsitektur tradisional Bugis Makassar tidak dapat diterapkan pada bangunan perkantoran. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan material penutup atap dan fungsi bangunan sebagai kantor. Penggunaan sudut kemiringan atap 15^0 sampai 60^0 dipengaruhi oleh pemakaian jenis material atap pabrikasi seperti atap seng, atap genteng, onduline dan atap metal. Atap seng dan onduline memerlukan sudut kemiringan atap minimal 15^0 untuk mengalirkan air hujan sedangkan atap genteng dan atap metal memerlukan sudut kemiringan atap minimal 30^0 untuk dapat mengalirkan air hujan. Begitu pula dengan fungsi bangunan sebagai perkantoran, bangunan perkantoran merupakan milik pemerintah, penghuni bangunan berganti-ganti sesuai dengan periode dan kepentingan pemerintah, sehingga tidak dapat menerapkan ketinggian atap berdasarkan ukuran antropometrik penghuni bangunan tersebut sebagaimana pada atap arsitektur tradisional Bugis Makassar.

1. Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan	2. Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kantor DPRD Kota Makassar	4. Kantor PT. PELNI Cabang Makassar

Gambar 4. Tinjauan Atap dari Sisi Perubahan Kemiringan

Perubahan ketinggian/kemiringan atap kantor tidak dipengaruhi oleh adanya strata sosial melainkan hanya dipandang dari sisi estetika dan kemampuan perencana mengombinasikan struktur atap tersebut. Atap bangunan kantor pemerintah, ketinggian/kemiringan semata-mata dipikirkan hanya unsur estetika pada bagian atap bangunan. Perubahan ketinggian/kemiringan atap tersebut didasari oleh budaya dan tradisi yang melekat pada masyarakat Bugis Makassar. Selain itu juga diwarnai dengan kemampuan perencana, pelaksana, dan keinginan pengguna bangunan.

KESIMPULAN

Arsitektur tradisional Bugis Makassar telah mengalami perubahan pada bagian atap bangunan. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui: 1) perubahan bentuk atap, 2) perubahan warna atap, 3) perubahan susunan *timpalaja//sambulayang*, dan 4) Perubahan ketinggian/kemiringan atap. Meskipun Arsitektur tradisional Bugis Makassar telah mengalami perubahan pada bagian atap bangunan namun perubahan tersebut tetap menganut prinsip-prinsip budaya dan tradisi masyarakat Bugis Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar. J, 2005. *Arsitektur dan Budaya Masyarakat Bugis Makassar*.

Budihardjo, E. 1989. *Jati Diri Arsitektur Indonesia*, Alumni, Bandung.

Budihardjo, E. 1997. *Arsitek dan Arsitek Indonesia Menyosong Masa Depan.* Andi, Yogyakarta.

Mardanas dkk. 1985. *Arsitektur Tradisional Sulawesi Selatan.* Ujung Pandang: Depdikbud

Republik Indonesia. 1982. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12.

Republik Indonesia. 1992. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Jakarta.

Ronald, A. 2005. *Nilai-nilai Arsitektur Tradisional Jawa.* Gadjah Mada Iniversity press, Yogyakarta.

Saliya. 2003. *Perjalanan Malam***.** Lembaga Arsitektur Indonesia Ikatan Arsitektur Indonesia-Jawa Barat, Bandung.

Tato, S. 2008. *Arsitektur Tradisional Sulawesi Selatan dari Masa ke Masa*. Makalah disajikan dalam Seminar Regional Arsitektur Rumah dan Perumahan Tradisional di Kawasan Timur Indonesia, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Unhas dan BPTPT Makassar, Makassar 24 April 2008.

Yudono, A. 2008. *Kearifan Arsitektur Tradisional Rumah Panggung dalam Hunian Modern.* Makassar.